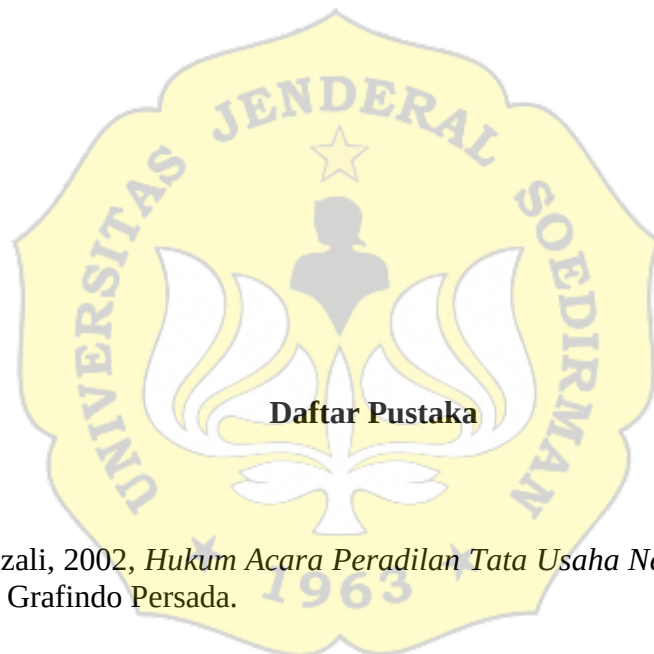




Daftar Pustaka

Literatur

- Abdulah Rozali, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiman, Arief, 1996, *Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Harahap, Zairin. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- J.B.J.M. ten Berge, 1996. *Besturen door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer.
- Kusuma Atmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : PT. Alumni.
- M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta Pusat : Pradnya Paramita.
- Mahfud M.D. Moch., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media.
- Mahmud, Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus, M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Riawan, Tjandra,W. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ridwan,HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Sjachran Basah, 1992. *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung : Alumni.
- Tahir Azhary M., 1992, *Negara Hukum Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta Bulan Bintang.
- Wiyono, R. , 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yamin Mohamad, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 976).

Putusan Pengadilan

Putusan PTUN Yogyakarta No. 06/G/2014/PTUN-YK.

Bahan Ajar

Tedi Sudrajat, *Materi Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Metode Pendekatan Masalah (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), Purwokerto, 2010.

Weda Kupita, *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), Purwokerto, 2010.

Internet

<http://kpknlyogyakarta.blogspot.co.id/2011/06/prosedur-lelang.html>.

